

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan dapat dilihat dalam perspektif dan ukuran yang berbeda, oleh karena itu diperlukan persamaan persepsi dan kriteria dalam melihat makna pembangunan. Pembangunan pada awalnya hanya diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai wujud tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi pada suatu negara, namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi khususnya pada negara yang sedang berkembang.

Negara berkembang pada dekade tahun 1950-1960 mengutamakan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dari pembangunan, namun hal ini justru menimbulkan permasalahan baru yaitu disparitas. Pada dekade berikutnya arah dan konsep pembangunan diarahkan pada tujuan pemerataan sebagai mana konsep redistribusi pertumbuhan yang menitikberatkan pada mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional demi meningkatkan standar hidup masyarakat.

a. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan guna mencetak sumberdaya manusia yang memadai untuk melaksanakan

pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan di berbagai sektor akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut. Pembangunan manusia merupakan hal yang penting terutama bagi sebagian negara khususnya negara yang sedang berkembang hal ini disebabkan oleh karena banyak negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan meningkatnya kemiskinan, selain itu pembangunan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional.

b. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator komposit tunggal yang meskipun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi dapat mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Ketiga komponen dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan, berketrampilan, serta akses

terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur tingkat kesejahteraan dengan membandingkan angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka harapan hidup serta pengeluaran untuk berkonsumsi. Indeks pembangunan manusia diperlukan agar dapat mengklasifikasi suatu negara tergolong dalam negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang serta dapat mengukur dan menentukan kebijakan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan.

Permasalahan mengenai capaian pembangunan manusia sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Ukuran pembangunan manusia yang sudah banyak dibuat tidak semuanya dapat digunakan untuk mengukur standar atau sebagai alat perbandingan antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menstandarisasi ukuran pembangunan manusia melalui *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

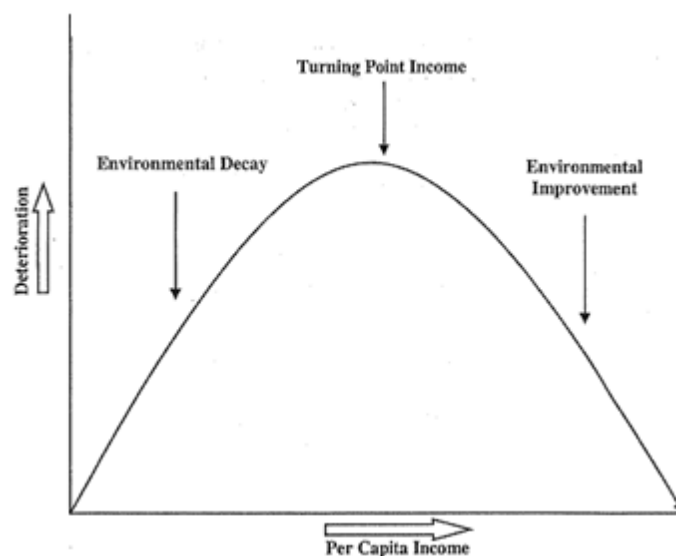
Pada tahun 1990 *United Nation Development Programme* (UNDP) untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep *Human Development Index* (HDI), dimana konsep HDI adalah menggabungkan antara indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli. Indeks pembangunan manusia kemudian dikembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq seorang

ekonom dari Pakistan beserta Gustav Ranis. Indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia. Beberapa alasan indeks pembangunan manusia dipakai untuk mengetahui kondisi masyarakat dimasing-masing daerah yaitu :

- a) Sebagai Indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia yang dilihat dari kualitasnya dalam menghasilkan output. Dengan cara melihat berbagai dimensi, yaitu seperti dimensi pendidikan, dimensi kesehatan serta dimensi pengeluaran.
- b) Dapat menjelaskan bagaimana berkesempatan untuk memperoleh hasil dari proses pembangunan yang ada dan merupakan bagian dari haknya, yaitu seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan hidup.
- c) Indeks pembangunan manusia dapat dijadikan alat ukur kinerja pemerintah di suatu daerah dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat pada daerah tersebut.
- d) Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur pembangunan kualitas hidup masyarakat pada daerah tertentu walaupun tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Hampir bersamaan dengan digunakannya IPM, pada tahun 1991 mulai diperkenalkan *Environmental Kuznetz Curve* atau kurva

lingkungan kuznetz yang dibuat oleh Simon Kuznet. Kurva lingkungan kuznetz merupakan modifikasi dari kurva kuznetz yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1954. Tingkat pembangunan sebuah negara yang diwakili indikator indeks pembangunan manusia menunjukkan semakin maju negara tersebut maka kondisi lingkungan secara makro akan baik.



Sumber: Yandle, Vijayaraghavan, Bhattarai (2002)

GAMBAR 2.1
Kurva Lingkungan Kuznetz

Kurva Lingkungan Kuznetz adalah penjelasan hipotetik yang menyatakan hubungan antara tingkat kerusakan lingkungan dengan pendapatan per kapita. Pada masa awal pembangunan, tingkat kerusakan lingkungan akan cenderung naik tapi kemudian mencapai titik balik dan dengan seiring naiknya pendapatan perkapita akan muncul usaha dan kesadaran untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Aspek pendapatan dalam IPM merupakan salah satu aspek

pengukuran standar kelayakan hidup yang diwakili oleh Pendapatan Nasional Bruto (PNB) negara yang bersangkutan.

Pada tahun 2010 terjadi perubahan metode perhitungan indeks pembangunan manusia. Perhitungan indeks pembangunan manusia metode lama menggunakan angka rata lama sekolah, angka melek huruf angka harapan hidup serta Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. Metode perhitungan yang baru menggunakan angka rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka harapan hidup serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perkapita. Perubahan metodologi penghitungan indeks pembangunan manusia didasari beberapa hal yaitu, pertama beberapa indikator dinilai sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan indeks pembangunan manusia seperti angka melek huruf tidak relevan dalam mengukur pendidikan karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan dan memang kini angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, oleh karena itu tidak relevan untuk membedakan tingkat pendidikan antar daerah. Kemudian PDB perkapita tidak begitu tepat dalam menentukan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Alasan kedua mengapa terjadi perubahan metodologi perhitungan indeks pembangunan manusia yaitu penggunaan rumus aritmatik dalam penghitungan metode yang lama menggambarkan bahwa hasil capaian yang rendah di suatu dimensi dapat diperbaiki oleh hasil capaian yang tinggi dari dimensi lain. Metodologi perhitungan

agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Perhitungan metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan indikator dengan baik. Rata-rata geometrik yang digunakan dalam menyusun indeks pembangunan manusia dapat diartikan bahwa hasil capaian satu dimensi tidak lagi dapat ditutupi oleh hasil capaian di dimensi lain. Sehingga untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi yang menjadi dasar perhitungan indeks pembangunan manusia harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Metode penghitungan IPM yang digunakan BPS mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP. Sejak tahun 2015, BPS telah menggunakan penghitungan IPM yang terbaru dengan melakukan penyesuaian pada beberapa indikator. Hal ini dilakukan karena masalah ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, angka IPM Indonesia hasil penghitungan BPS tidak dapat dibandingkan dengan angka IPM Indonesia yang dihitung oleh UNDP. Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung IPM menurut sumber data Susenas 2002, 2005, 2008 adalah sebagai berikut:

$$\text{IPM} = \frac{1}{3}(\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

Dimana :

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standart Hidup Layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksinya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i: I_i = \frac{X_i - MinX_i}{MaxX_i - MinX_i}$$

Keterangan:

I_i = Indeks komponen IPM ke i di mana $i = 1,2,3$

X_i = Nilai indikator komponen IPM ke i

Max X_i = Nilai maksimum X_i

Min X_i = Nilai minimum X_i

c. **Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia**

UNDP dalam publikasinya melaporkan bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Index* (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan manusia yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara

sempurna. Dimana indikator yang dipilih sebagai alat tolak ukur dimensi HDI adalah sebagai berikut:

- a) *Longevity*, dapat diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau infant mortality rate
- b) *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yaitu angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (adult literacy rate) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 tahun ke atas (the mean years of schooling).
- c) *Access to resource*, diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi purchasing power parity dalam dolar AS serta dilengkapi dengan tingkatan partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi perhitungan metode baru indeks pembangunan manusia yaitu:

- 1) Angka Harapan Hidup Saat Lahir – AHH (*Life Expectancy –e0*)
- 2) Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling – MYS*)
- 3) Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling – EYS*)
- 4) Pengeluaran per Kapita disesuaikan

Indeks pembangunan manusia menjadi faktor penting dalam ukuran kesuksesan sebuah pembangunan daerah. IPM juga menjelaskan tentang cara manusia memilih peluang untuk mengakses

hasil dari proses pembangunan suatu wilayah, sebagai tanda bagian dari hak yang harus diterima seperti memperoleh pendapatan sesuai standar, pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai serta pemerataan kesejahteraan. Berdasarkan kajian mengenai indeks pembangunan manusia menurut UNDP, untuk mengetahui capaian indeks pembangunan manusia antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. $IPM < 60$: IPM rendah
- b. $60 < IPM < 70$: IPM sedang
- c. $70 < IPM < 80$: IPM tinggi
- d. $IPM < 80$: IPM sangat tinggi

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Endogen

Perkembangan selanjutnya dari teori pertumbuhan membawa kepada munculnya sebuah paradigma baru yang menganalisis pertumbuhan dari sudut pandang endogen. Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, teori pertumbuhan endogen merupakan hasil dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi dan bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk

berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia.

Teori pertumbuhan endogen menganggap akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi definisi modal menurut teori ini diperluas dengan memasukkan modal ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Menempatkan stok pengetahuan sebagai salah satu faktor produksi yang semakin meningkat. Sehingga tingkat pertumbuhan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing negara untuk meningkatkan dan menciptakan stok pengetahuan. Oleh karena itu negara maju dengan kemampuan menciptakan pengetahuan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara miskin akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan negara miskin. Dalam hal ini teori pertumbuhan endogen menjelaskan mengapa akumulasi modal tidak mengalami *diminishing return*, tetapi justru mengalami *increasing return* dengan adanya spesialisasi dan investasi di bidang sumber daya manusia.

Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari sebuah proses pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi tersebut salah satunya didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas,

sehingga mereka dapat melakukan inovasi teknologi yang dapat memberikan manfaat besar terhadap pembangunan.

Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan demikian bahwa pentingnya kebijakan mendasar untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dengan memberikan subsidi pada sekolah (Mankiw, 2000).

Teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Romer dan Lucas merupakan awal kebangkitan dari pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia yang ditandai oleh perkembangan teknologi modern yang digunakan dalam proses produksi. Sehingga permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijelaskan secara baik oleh teori Neo-Klasik.

Teori pertumbuhan endogen memiliki tiga elemen, yaitu perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui proses akumulasi pengetahuan, adanya inovasi oleh perusahaan sebagai akibat adanya mekanisme *spillover* dan *learning by doing* karena penciptaan ilmu pengetahuan pada suatu perusahaan diasumsikan mempunyai dampak positif secara eksternal pada teknologi produksi perusahaan lain,

produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh fungsi produksi pengetahuan yang tumbuh tanpa batas.

b. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Sukirno, 2000).

Suatu perekonomian disebut mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada intinya aktivitas perekonomian merupakan sebuah proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan

pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Sukirno, 2006). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dalam kegiatan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan output barang dan jasa sehingga berakibat pada kenaikan pendapatan perkapita. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2. Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3. Ilmu pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

4. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

c. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia adalah saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pada satu sisi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia melalui kegiatan rumah tangga dan juga pengeluaran pemerintah. Pada sisi pembangunan manusia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas pekerja. Hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan

ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan (UNDP, 1996). Untuk meningkatkan IPM, tidak hanya semata tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan pembangunan.

3. Belanja Modal

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdiri atas:

- 1) Anggaran pendapatan, meliputi:
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - b) Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

2) Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.

3) Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari :
Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

1) Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai

b) Belanja Bunga

c) Belanja Subsidi

d) Belanja Hibah

e) Belanja Bantuan Sosial

f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

h) Belanja Tidak Terduga

2) Belanja Tak langsung

a) Belanja Pegawai

b) Belanja Modal

b. Pengertian Belanja Modal

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Dalam anggaran belanja daerah terdapat pos belanja modal daerah dan merupakan kategori dari belanja langsung, Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk membeli keperluan barang-barang yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan daerah khususnya dalam upaya pembangunan daerah. Badan Pusat Statistik (2015) mendeskripsikan belanja modal sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018, belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap (AT) dan atau aset lainnya atau menambahkan nilai AT dan atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi AT/aset lainnya yang

ditetapkan pemerintah. Aset Tetap atau aset lainnya tersebut dipergunakan atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset Kementerian/Lembaga terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik.

c. Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

1) Teori Rostov dan Musgrave

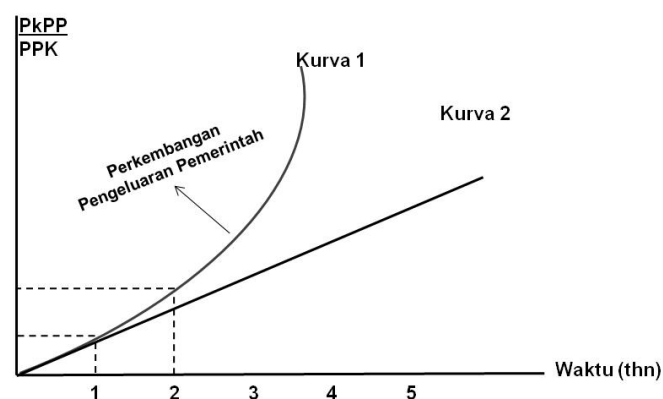
Teori Rostov dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah perkembangan ekonomi, investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2006).

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, persentase investasi swasta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan

semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostov menyatakan bahwa dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana menjadi pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya kesejahteraan hari tuam program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

2) Teori Wagner

Teori Wagner menyebutkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan besarnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Teori menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan tumbuh lebih cepat dari PDB. Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah akan meningkat guna membiayai tuntutan masyarakat mengenai kemudahan mobilitas guna mendukung kegiatan ekonomi (Mangkoesobroto, 1997)



Sumber : Mangkoesobroto, 1997

Gambar 2.2
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner

Hukum wagner yang menjelaskan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah ditunjukkan dalam kurva di atas, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial dengan kurva berbentuk cembung dan bergerak naik dari kiri bawah menuju kanan atas. Berdasarkan kurva di atas diketahui bahwa pada tahun ke-1, presentase pengeluaran pemerintah masih relatif kecil terhadap PDB, sedangkan pada tahun ke-2, presentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB mengalami peningkatan, karena itulah kurva pengeluaran pemerintah mempunyai kurva eksponensial yang ditunjukkan pada kurva di atas.

d. Hubungan antara belanja modal dengan indeks pembangunan manusia

Belanja daerah dapat mengarahkan pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berguna bagi masyarakat melalui berbagai program pemerintah yang dianggarkan. Dengan demikian melalui belanja modal daerah, pembangunan yang mengarah pada peningkatan pembangunan manusia dapat berjalan dengan baik. Ketika pemerintah mengeluarkan dana untuk membiayai investasi dan pembangunan infrastruktur maka akan mempekerjakan tenaga kerja yang kemudian akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga konsumsi agregat akan meningkat dan mendorong peningkatan produksi (Taufik, 2016). Produksi yang meningkat akan menyebabkan permintaan yang lebih besar terhadap tenaga kerja,

sehingga terciptanya kesempatan kerja yang terbuka luas dan tingkat kemiskinan menjadi lebih rendah. Hal tersebut merupakan gambaran mengenai kesejahteraan yang meningkat dan tercapainya standar hidup layak pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut.

4. Jumlah Rumah Sakit

a. Pengertian Rumah Sakit

Pada tingkat mikro, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga Kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dan memiliki penghasilan yang tinggi. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan faktor penting untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi yang cepat karena didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi (Patriotika, 2011). Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari peningkatan produktivitas karena kondisi kesehatan yang baik sangatlah penting untuk diperhatikan. Daerah dengan tingkat kesehatan yang lebih baik, maka penduduknya memiliki rata-rata hidup lebih lama. Sehingga semakin banyak jumlah rumah sakit maka akan semakin baik pula tingkat kesehatan di suatu daerah. Infrastruktur yang berkualitas adalah sektor pendukung yang sangat penting dalam setiap aktivitas agar

berlangsung efektif dan efisien. Pembangunan akan tercapai jika didukung oleh infrastruktur memadai yang diindikasikan dengan kualitas layanan sarana dan prasarana yang baik seperti prasarana kesehatan dan pendidikan (Patriotika, 2011). Daerah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik akan memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dengan demikian keberadaan rumah sakit dan sarana kesehatan yang lain sangat diperlukan bagi masyarakat.

Pengertian rumah sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dinyatakan bahwa rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Dari pengertian tersebut, rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, dan pelayanan medik lainnya sehingga

perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit yang sesuai dengan persyaratan kesehatan.

b. Hubungan antara jumlah rumah sakit dengan indeks pembangunan manusia

Untuk meningkatkan tingkat kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Rumah sakit dan puskesmas adalah sarana yang disediakan pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan di setiap daerah, agar tidak terjadi terganggunya aktivitas dan menurunnya produktivitas tenaga kerja. Penyediaan infrastruktur kesehatan yang memadai adalah pondasi dasar untuk meningkatkan angka harapan hidup yang layak bagi masyarakat, jika penduduknya memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Semakin banyaknya rumah sakit maupun puskesmas di setiap daerah maka pelayanan kesehatan akan memadai sehingga terciptanya pembangunan manusia yang lebih baik lagi.

5. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Pengertian Program BOS

Investasi dalam hal pendidikan mutlak diperlukan oleh masyarakat maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah

terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

Pendidikan tidak hanya akan menghasilkan SDM yang berkualitas, tetapi juga dapat menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan langkah menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro dan Smith 2006).

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan terutama pada tingkat dasar dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu program pemerintah untuk menikmati pendidikan dasar yaitu melalui program Bantuan Operasional Sekolah. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dari Kas Umum Negara ke kas daerah provinsi untuk kemudian ditransfer ke rekening masing-masing sekolah dengan naskah hibah antara pemerintah provinsi dengan sekolah negeri atau

swasta penerima Dana BOS. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyaluran Dana BOS dilakukan setiap periode triwulan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Khusus untuk sekolah di daerah terpencil, penyaluran dana BOS dilakukan setiap 6 bulan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) dijenjang Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan

oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

b. Hubungan antara program bantuan operasional sekolah dengan indeks pembangunan manusia

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah akan membiayai siswa-siswa yang tidak mampu untuk dapat mendapatkan pendidikan yang bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar. Program BOS dapat mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar lalu kemudian mempengaruhi indeks pendidikan dan berakhir pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilihat dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia. Pendidikan tidak hanya akan menghasilkan SDM yang berkualitas, tetapi juga dapat menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan referensi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian yang dilakukan oleh Salem (2018) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Daerah, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Periode 2001-

2016”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016. Penelitian ini merupakan *study eksplanatory* dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi daerah tidak berpengaruh terhadap ipm, sedangkan variabel belanja daerah dan tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2017) dengan judul “*Effect of Human Development Index Fund on Economic Growth Through a Special Autonomy*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pemberian dana otonomi khusus. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan metode regresi data panel. Hasil penelitian ini adalah melalui penggunaan dana otonomi khusus menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2013) dengan judul “Hubungan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD-SMP dan Angka Partisipasi Kasar terhadap IPM di Lampung.”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan Bantuan Operasional Sekolah dan Angka Partisipasi Kasar terhadap IPM di Lampung. Dari hasil perhitungan yang menggunakan analisis tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2005 – 2009 (tahun penelitian) terjadi peningkatan yang signifikan dalam kualitas Sumber Daya Manusia di

Lampung. Program BOS dan Angka Partisipasi Kasar mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dilihat dari kenaikan rata – rata tiap tahunnya. Rata – rata perubahan dana BOS tiap tahun sekitar 27,14%. Total rata – rata Angka Partisipasi Kasar SD sebesar 108,5% dan SMP sebesar 82,2 dengan rata – rata IPM sebesar 68,79%. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar ini cukup dalam penuntasan Wajib Belajar 9 tahun sehingga pencapaian Indeks Pembangunan Manusia termasuk ke dalam golongan menengah atas sehingga tujuan Pemerintah dan Departemen Pendidikan dapat tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2018) dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Daerah Provinsi Yogyakarta tahun 2010 hingga 2016. Dalam penelitian ini menggunakan data panel sekunder yang terdiri dari data *time series* dan *cross section*. Metode analisis yang digunakan yaitu model regresi data panel (*pooled least square*). Analisis data panel dengan metode *fixed effect models* digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen indeks pembangunan manusia di Daerah Provinsi Yogyakarta. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan dan tidak berpengaruh secara signifikan. Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pendidikan dalam penelitian ini mempengaruhi variabel indeks pembangunan manusia secara signifikan dan positif. Untuk variabel indeks gini mempengaruhi variabel indeks pembangunan manusia secara signifikan dan

negatif. Sedangkan variabel kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) dengan judul “Analisis Pembangunan Manusia (*Human Development*) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah rumah sakit, jumlah sekolah, dan upah minimum regional terhadap pembangunan manusia di Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah sekolah dan upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Tengah. Sedangkan variabel jumlah rumah sakit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Triadani (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di provinsi lampung baik secara parsial maupun secara simultan, serta bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap IPM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*). Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi lampung. Dalam perspektif ekonomi islam memandang bahwa manusia sebagai khalifah dimuka

bumi dalam rangka menjaga dan melestarikan alam. Termasuk mengelola sumber daya alam sebagai ciptaan-Nya untuk digunakan demi kemaslahatan umat.

Penelitian yang dilakukan oleh Adelfina dan Jember (2016) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan belanja daerah secara parsial dan simultan terhadap IPM di Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, serta secara parsial variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Arisman (2018) dengan judul “*Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia negara di wilayah dan anggota ASEAN. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, dan jumlah penduduk mempengaruhi indeks pembangunan manusia di wilayah ASEAN, sedangkan nilai inflasi dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah ASEAN.

Penelitian yang dilakukan oleh Ranis (2001) tentang pengaruh timbal-balik antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan pembangunan manusia (*human development*) di negara-negara Amerika Latin. Mereka menggunakan model persamaan simultan, masing-masing untuk persamaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Pembangunan manusia dengan proksi tingkat kematian bayi (HD) dipengaruhi oleh variabel-variabel tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita ($GDP\ growth\ rate = GDP$), persentase belanja pemerintah untuk pendidikan terhadap PDB ($public\ expenditure\ on\ education\ as\ a\ percentage\ of\ GDP = PEE$) dan tingkat partisipasi kasar sekolah tingkat dasar perempuan ($gross\ female\ primary\ school\ enrollment\ rate = FPS$). Dari hasil regresi diperoleh bahwa pembangunan manusia tidak signifikan dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga penelitian ini memiliki kelemahan dalam menjelaskan pengaruh timbal-balik antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Hanya variabel FPS di luar dummy yang signifikan menjelaskan pembangunan manusia di negara-negara Amerika Latin. Penggunaan tingkat kematian bayi sebagai proyeksi pembangunan manusia diperkirakan sebagai penyebab tidak baiknya hasil estimasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifana (2017) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan IPM, faktor yang memengaruhi IPM serta kebijakan untuk meningkatkan IPM di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan analisis *fixed effect model*.

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa variabel yang memengaruhi IPM di Jawa Tengah dengan pengaruh terbesar hingga terkecil adalah belanja modal, rasio ketergantunganm persentase penduduk miskin, jumlah rumah sakit, Angka Partisipasi Sekolah SMP, Angka Partisipasi Sekolah SMA dan angka kesakitan.

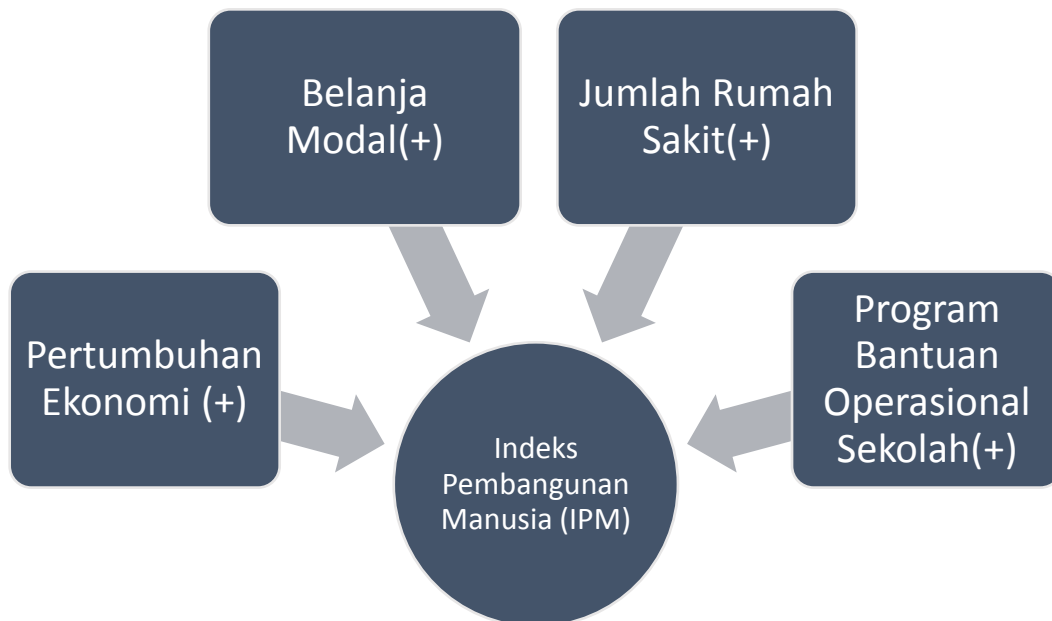
Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Supadmi (2016) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia” yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pengaruh positif dan signifikan ini berarti semakin meningkat PAD dan Belanja Modal, maka peningkatan IPM juga meningkat. Terjadinya peningkatan disebabkan oleh pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal telah dimanfaatkan dengan tepat sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

C. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah suatu dugaan yang masih bersifat sementara. Berawal dari berbagai permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan yang ingin dicapai dengan berlandaskan teori-teori yang telah dikemukakan dari para ahli. Berikut adalah hipotesis yang dapat dikemukakan pada penelitian ini :

1. Diduga variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
2. Diduga variabel Belanja Modal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
3. Diduga variabel Jumlah Rumah Sakit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
4. Diduga variabel Program Bantuan Operasional Sekolah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

D. Model Penelitian



GAMBAR 2.3
Model Penelitian